

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ni Made Suryaningsih¹
Eka Ardhani Sisdyani²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: dissurya@ymail.com / telp: +6289674544645

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 295 kabupaten/kota dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kemakmuran, status daerah, dan belanja modal daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat dan opini audit berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: kinerja keuangan, kemakmuran, status daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan opini audit

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the characteristics of the local government and audit opinion on the financial performance of local governments in all urban districts in Indonesia. The samples used were as many as 295 districts / cities using purposive sampling method. Data were collected by using the method of documentation. The result show that the prosperity, status, and capital expenditure has no effect on the financial performance, while the level of dependence on the central government and audit opinion affect the performance of local governments.

Keywords : *financial performance, prosperity, status area, the level of dependence on central, capital expenditures, and audit opinion*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1996 Indonesia telah mengalami krisis ekonomi dan puncak krisis ekonomi pada tahun 1997. Penyelenggaraan keuangan daerah dapat mendorong pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat dalam, pelayanan atas dasar keuangan daerah sendiri dan membiayai pembangunan. Pada tahun 1998 terjadi reformasi birokrasi di Indonesia yang telah membawa perubahan bagi politik dan sistem pemerintahan maupun administrasi keuangan negara yang diawali dengan

perubahan sistem organisasi. Perubahan teknik prosedur pemerintahan mengalihkan dari sentralistik ke desentralistik. Tujuan desentralisasi di Indonesia adalah untuk mempromosikan penyampaian informasi yang lebih baik dari layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Rusmin *et al.*, 2014). Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing (Bennet, 2010). Penthury (2011) juga menyatakan pengelolaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyampaikan fasilitas bantuan publik yang lebih baik. Menyiapkan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas yang sehingga infrastruktur merupakan kunci akan pertumbuhan ekonomi (Modebe *et al.*, 2012).

Wahyudi Kumorotomo (2009) menyatakan bahwa terdapat masalah akuntabilitas di Indonesia. Sehubungan dengan *administrative accountability* dan *professional accountability*, isu pokok yang ada yaitu buruknya kinerja penyelenggaraan anggaran daerah. Masalah tersebut dapat dilihat dari semakin sedikitnya LKPD yang memperoleh (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu hal yang penting untuk dilakukan ialah pengukuran kinerja keuangan daerah, karena bagian penting dari pemulihan dalam sektor pemerintahan yaitu dengan menyusun pengukuran kinerja (Greiling, 2005). Publikasi laporan keuangan di internet merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Laswad *et.al.*, 2005). Metode yang bisa dipergunakan pemerintah daerah didalam menggapai tujuannya adalah pengukuran kinerja (Halachmi, 2005). Yang dan Hsieh (2007) juga menemukan bahwa pengukuran kinerja adalah elemen kunci untuk reformasi pemerintahan.

Lee (2008) membahas indikator dan informasi kinerja yang mempergunakan laporan tahunan sebagai sarana pengawasan untuk manajemen intern dan akuntabilitas ektern.

Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara merupakan tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk menilai kewajaran atas LKPD maka BPK RI melakukan audit yang hasilnya dituangkan dalam LHP. Opini dalam laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan pada Peraturan yang memiliki pengaruh langsung serta material terhadap penyajian laporan keuangan (BPK RI, 2011). Keberhasilan pemerintah daerah dalam mendapatkan opini WTP, akan mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah (Suwanda, 2015). (Kuntadi, 2008 dalam Nurdin 2014) menyatakan bahwa dalam LKPD dapat dilihat berapa dana APBD yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang ingin dicapai oleh Pemda.

Pengungkapan LKPD yang dinyatakan masih rendah dapat mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK. Tahun 2010 BPK melakukan pemeriksaan semester II dan mendapatkan hasil bahwa pada tahun 2008-2009 sebanyak 27 LKPD dari 981 LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini terbagus adalah *unqualified* yang memiliki arti bahwa laporan LKPD disajikan dan diungkapkan secara wajar. Opini terburuk adalah tidak wajar. *Disclaimer* terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak bisa diaudit sesuai

dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), maka dari itu, baik opini *adverse* maupun *disclaimer* tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan (Heriningsih, 2013).

Karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Perbedaan karakteristik antar daerah diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Sumarjo, 2010). Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan pemerintahan yang dikarenakan belum mampunya pemerintah daerah untuk membiayai belanja aparturnya sendiri. Kualitas pelayanan publik yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah diharapkan akan meningkat jika adanya peningkatan infrastruktur daerah (Marfiana, 2013). Status daerah memengaruhi kelengkapan pengungkapan karena terdapat perbedaan karakteristik masyarakat serta struktur pendapatan yang dapat berdampak terhadap kontrol sosial pada penduduk kota.

Terkait dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel hasil audit BPK RI dikaitkan dengan kinerja dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menunjukkan temuan audit berpengaruh negatif pada skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota dengan menggunakan data tahun 2007, hasil serupa juga ditunjukkan oleh Sudarsana (2013) dengan menggunakan data tahun 2010 dan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2014) juga menunjukkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota dengan menggunakan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data tahun 2013,

disebabkann karena mempergunakan data tahun terkini yang diharapkan mampu memberi informasi yang lebih relevan.

Tujuan dari penelitian ini terkait latar belakang masalah diatas adalah untuk mengetahui pengaruh kemakmuran pemerintah daerah pada kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh status daerah pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, untuk dapat mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh belanja modal daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, serta untuk mengetahui pengaruh opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan Teoritis yaitu penelitian diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta sumbangan studi empiris untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegunaan Praktis yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori keagenan adalah sebuah teori yang membahas mengenai hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan telah digunakan untuk menjelaskan hubungan kompleks antara berbagai instansi pemerintah. Menurut Fadzil dan Nyoto (2011) masyarakat dikatakan sebagai prinsipal sedangkan Pemerintah daerah sebagai agen. Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat juga diterapkan.

Agency theory memandang bahwa banyak terjadinya *information asymmetry* yang berdampak pada penyelewengan atau korupsi oleh agen. Cara yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat adalah dengan menunjukkan hasil dari kinerja keuangan pemerintah yang sudah dicapai (Osborne dan Gaebler, 1992 dalam Akbar dan Pilcher, 2012). Model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak yaitu *outcome-based*, yaitu adanya insentif yang memotivasi agen untuk mencapai kepentingan principal dan *behavioral-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen (Carr dan Brower, 2000).

Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Bastian (2006), yaitu untuk menilai kinerja keuangan dalam hal efisiensi dan efektifitas. Mandell (1997) dan Vago (2008) menyatakan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah dapat memperoleh informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah. Selain karakteristik pemerintah daerah, peneliti juga mempergunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Kinerja keuangan dari pemerintah daerah dapat dipengaruhi dari adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah.

Jumlah pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Kemakmuran Pemerintah Daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga, 2011). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (Nugroho, 2012). Menurut Kelly (2010) besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (*intergovernmental revenue*) masih banyak ditemui di negara berkembang.

Status daerah merupakan sebuah pengakuan nasional atas suatu daerah sebagai kabupaten atau kota. Pemerintah kota dengan sumber dana yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena dukungan sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran pemerintah daerah, sehingga mampu menciptakan kinerja yang lebih baik (Herningsih, 2013). Status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan yang dapat berimplikasi pada kontrol sosial penduduk kota terhadap kecenderungan untuk mematuhi standar akuntansi (Abdullah, 2006). Di era globalisasi ini, pengetahuan masyarakat mengenai terselenggaranya pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota semakin meningkat sehingga pemerintah harus mengembangkan daerah masing-masing seperti potensi daerah.

Tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU), Mustikarini dan Fitriyasi (2012). DAU merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Green (2005) dalam tulisannya menyatakan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih kepada

desentralisasi administrasi daripada desentralisasi fiskal, hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat masih membagi Pendapatan Negara untuk kebutuhan Pemda. Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah. Peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari penggunaan DAU serta penerimaan lainnya (Sudarsana, 2013).

Aset tetap dari pemerintah daerah yaitu berupa peralatan, infrastruktur, serta harta tetap lainnya diperoleh dengan menggunakan belanja daerah. Belanja modal yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap merupakan prasyarat utama didalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah setiap tahun akan mengadakan pengadaan terhadap aset tetap sesuai dengan prioritas dari anggaran serta pelayanan publik (Abdulah, 2006).

Audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor. Pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran dari laporan keuangan disebut dengan opini audit. Pernyataan terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor menyangkut tentang materialitas, posisi keuangan, serta arus kas. Temuan, opini, kesimpulan, ataupun rekomendasi merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Terdapat lima opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu *unqualified*, *unqualified opinion with modified wording*, *qualified*, *adverse*, dan *disclamer*. *Unqualified* merupakan opini terbaik yang dapat diberikan. *Unqualified* merupakan opini yang menunjukkan bahwa laporan LKPD telah disajikan serta diungkapkan secara wajar. Opini terburuk adalah *adverse*. *Adverse* merupakan opini yang diberikan karena informasi laporan keuangan LKPD tidak diungkapkan secara wajar.

Disclamer terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN). Penelitian yang dilakukan Bernstein (2000) menyimpulkan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan termasuk audit kinerja dan evaluasi program.

Proses analisis data yang dilakukan secara sistematis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Permendagri No. 73 Tahun 2009). Tujuan dari adanya EKPPD yaitu untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya. Penentuan status keinerja dari penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, penentuan peringkat, serta pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi merupakan bentuk dari pelaksanaan EKPPD. Laporan kinerja instansi pemerintah, informasi keuangan daerah, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan sumber informasi dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Pemerintah mempersiapkan pemberian penghargaan (*award*) kepada daerah yang mempunyai prestasi kinerja tertinggi secara nasional ataupun yang berkinerja tinggi selama 3 tahun berturut-turut.

Ketergantungan dana dari pemerintah pusat dapat diperkecil dengan penguasaan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan (Nugroho, 2012). Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu tolak ukur kemampuan dan

cermin kemandirian daerah (Nurdin, 2014). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah akan mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, ini menandakan pemerintah daerah berhasil membuat dan melaksanakan kebijakan/program guna meningkatkan penerimaan daerah (Nurdin, 2014). Kemakmuran pemerintah daerah menurut Christiaens (1999) dalam Syafitri (2012) berhubungan positif dengan peningkatan pengungkapan. Dari uraian di atas didukung oleh penelitian (Julitawati 2012) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan hasil penelitian Marfiana (2013) menunjukkan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya itu guna perbaikan kinerja. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Kemakmuran Pemerintah Daerah berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Status daerah merupakan suatu otonomi yang diberikan antara pusat kepada daerah. Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai Kota cenderung mematuhi standar akuntansi karena kontrol sosial pada penduduk kota cenderung lebih kuat (Nugroho, 2012). Adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan dapat berpengaruh terhadap perbedaan kontrol sosial (Abdullah, 2006). Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah sejalan dengan adanya pengaruh globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat (Hermningsih, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₂: Status Daerah berpengaruh pada Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah dengan daerah serta antar daerah dapat diturunkan dengan adanya dana perimbangan. Dana perimbangan dapat juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah (Nugroho, 2012). Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang diberikan kepada Pemda dalam rangka pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan antar Pemda, tidak terdapat *effort* yang dilakukan Pemda untuk mendapatkan Dana Perimbangan. Tingginya persentase jumlah dana perimbangan mengindikasikan bahwa Pemda tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian akuntabilitas kinerja semakin rendah karena persentase Dana Perimbangan yang tinggi mengindikasikan bahwa Pemda tidak mampu dalam merencanakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD (Nurdin , 2014). Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel ketergantungan pada kinerja pemerintah pusat adalah (Julitawati et. al 2012) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun anggaran serta dapat menambah kekayaan atau aset daerah dan dapat

mengakibatkan bertambahnya belanja yang bersifat rutin disebut dengan belanja modal. Banyaknya infrastruktur serta sarana yang dibangun merupakan cerminan dari adanya belanja modal yang besar. Pelayanan kepada masyarakat akan meningkat apabila pembangunan yang dilakukan semakin banyak sehingga kinerja dari daerah dapat semakin baik (Sudarsana, 2013). Semakin tinggi belanja, Pemda seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Penelitian yang menggunakan variabel belanja daerah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja, hal ini berarti bahwa semakin besar belanja daerah maka semakin kecil skor kinerja. Menurut Sudarsana (2013) dimana belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda, sedangkan penelitian (Nugroho 2012) menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung. Berdasarkan uraian diatas maka apakah belanja yang telah terealisasi sudah sesuai dengan tujuan dalam program/kegiatan yang telah direncanakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Belanja Modal Daerah berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan memberikan opini sesuai dengan hasil laporan tersebut. Opini auditor sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berasal dari pihak eksternal, sehingga seringkali terdapat gejala di daerah terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini audit BPK merupakan kasus-

kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah pada ketentuan pengendalian intern maupun pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Opini, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda (Sudarsana, 2013). Adanya opini ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, semakin banyak jumlah opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Opini maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah (Nugroho, 2012). Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu. Sedangkan penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan mengacu pada penelitian diatas dapat dirumuskan dalam hipotesis terakhir penelitian ini.

H₅: Opini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indonesia tahun 2013 yang datanya diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui (<http://otda.kemendagri.go.id>). Ikhtisar pemeriksaan semester I tahun 2013 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu (<http://www.bpk.go.id>). Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan didapatkan melalui website (<http://www.djpk.depkeu.go.id>). Obyek dari penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Daerah.

Kinerja pemerintah daerah merupakan variabel terikat pada penelitian ini. Karakteristik pemerintah daerah (kemakmuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah, dan status daerah) serta opini audit merupakan variabel bebas yang digunakan. Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Florida (2007) yang mengindikasikan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Semakin tinggi PAD menandakan semakin bagus kinerja suatu pemerintah daerah. Proksi yang digunakan adalah PAD dibagi Total Pendapatan (Sudarsana, 2013). Status daerah diukur dengan pemberian skor, jika Kabupaten diberi skor 1 (satu) dan jika status daerah adalah Kota, diberi skor 2 (dua) (Abdullah, 2006).

Kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat ketergantungan pada pusat karena dana digunakan untuk infrastruktur pemerintah daerah (Nugroho, 2012). Proksi yang digunakan adalah Total dana perimbangan dibagi total pendapatan (Nugroho, 2012).

Semakin tinggi belanja modal menandakan semakin bagus kinerja pemerintah daerah (Nugroho, 2012). Proksi yang digunakan adalah Belanja modal dibagi total belanja sejalan dengan (Nugroho, 2012). Semakin banyak ditemukan opini WTP dan WDP di suatu pemerintah Kabupaten/Kota yang ditemukan audit

BPK maka kinerja pemerintah semakin baik (Virgasari, 2009). Proksi yang digunakan yaitu jika Opini Tanpa Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), diberi skor 0 (nol), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 2 . Opini audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Nugroho (2012).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupate/Kota di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 295 pemerintah daerah di Indonesia 2013 yang memiliki data yang lengkap. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*, dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses laporan keuangan tahun 2013. Data diperoleh dengan mengakses situs Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Statistik deskriptif memberikan deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2012). Uji asumsi klasik adalah pengujian untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat agar terbebas dari gejala asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Untuk menguji normal atau tidaknya sebuah model dapat dilakukan dengan melakukan uji *kolmogorov-sminarnov*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan *VIF* kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas (Utama, 2012:105). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser (Utama, 2012:106). Model regresi dikatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

Analisis regresi linier berganda adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK RI pada kinerja pemerintah daerah yang akan diuji dengan tingkat signifikansi. Persamaan yang dihasilkan dari hubungan antar variabel tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots \dots \dots (1)$$

- Y : Kinerja
- β_a : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$: Koefisien variabel independen
- X_1 : Kemakmuran Pemda
- X_2 : Status Daerah
- X_3 : Tingkat Ketergantungan pada Pusat
- X_4 : Belanja modal Daerah
- X_5 : Opini audit

Goodness of Fit dari analisis regresi linier berganda dapat diamati dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji F) dan uji hipotesis (uji t). Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai dari koefisien

determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien determinasi tinggi atau mendekati atau sama dengan 1, menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh signifikansi secara serempak seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F yang signifikan apabila nilai $F_{sig} \leq 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian parsial merupakan nama lain dari uji t apabila variabel bebas yang digunakan lebih dari satu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah se-Indonesia tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 508 kabupaten/kota dari 34 provinsi (kppod, 2015). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 295 pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Tabel 1.
Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah Amatan
1	Jumlah kabupaten/kota di Indonesia	508
2	Kabupaten/kota yang tidak melaporkan LKPD pada Kementerian Keuangan RI	(154)
3	Pendapatan Asli Daerah yang tidak diungkapkan	(2)
4	Dana Alokasi Umum yang tidak diungkapkan	(4)
5	Tidak ada Opini audit BPK RI pada LKPD	(53)
	Jumlah Sampel	295

Sumber : data diolah, 2015

Statistik deskriptif digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah untuk dipahami. Tabel 2 menyajikan hasil dari statistik deskriptif.

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Kemakmuran	295	0,0136	0,5332	0,090073	0,0744780
Status	295	1	2	1,22	0,417
Ketergantungan	295	0,2790	0,9590	0,751288	0,1119825
Belanja	295	0,0794	2,0821	0,242651	0,1613193
Opini	295	0	2	1,28	0,520
Kinerja	295	0	3	1,91	0,711

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah pengamatan (N) dari penelitian ini adalah berjumlah 295. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum di dalam tabel, sedangkan nilai tertinggi dari data ditunjukkan oleh skor maksimum. Mean digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari data, dan standard deviation menunjukkan simpangan baku.

Variabel kemakmuran pemerintah daerah memiliki skor minimum sebesar 0,0136 dan memiliki skor maksimum sebesar 0,5332 didapat skor rata-rata sebesar 0,090073 dan standar deviation sebesar 0,0744780. Variabel status daerah memiliki skor minimum sebesar 1 dan memiliki skor maksimum sebesar 2 sehingga didapat skor rata-rata sebesar 1,22 dan standar deviation sebesar 0,417. Variabel tingkat ketergantungan memiliki skor minimum sebesar 0,2790 dan memiliki skor maksimum sebesar 0,9590 didapat skor rata-rata sebesar 0,751288 dan standar deviation sebesar 0,1119825. Variabel opini audit BPK memiliki skor minimum sebesar 0 dan memiliki skor maksimum sebesar 2, sehingga didapat skor rata-rata sebesar 1,28 dan standar deviation sebesar 0,520. Variabel kinerja

pemerintah daerah memiliki skor minimum sebesar 0 dan memiliki skor maksimum sebesar 3 sehingga didapat skor rata-rata sebesar 1,91 dan standar deviation sebesar 0,711.

Uji normalitas berdistribusi normal apabila koefisien Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat alpha, = 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	295
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,099

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.099. Nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,099 menunjukkan bahwa probabilitas penerimaan 0,099 atau lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Kemakmuran	0,236	4,229
2	Status	0,803	1,245
3	Ketergantungan	0,256	3,907
4	Belanja	0,967	1,034
5	Opini	0,951	1,052

Sumber: data diolah, 2015

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF yang diperoleh lebih kecil dari

10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolienearitas antar variabel bebas.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1	Kemakmuran	0,882	Bebas Heteroskedastisitas
2	Status	0,223	Bebas Heteroskedastisitas
3	Ketertanggung	0,267	Bebas Heteroskedastisitas
4	Belanja	0,215	Bebas Heteroskedastisitas
5	Opini	0,871	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah, 2015

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dikatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Tabel 5 menunjukkan seluruh variabel bebas terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05.

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig
Konstanta	3,274		
Kemakmuran	0,198	0,191	0,849
Status	-0,100	-0,993	0,322
Ketertanggung	-2,178	-3,276	0,001
Belanja	0,013	0,055	0,956
Opini	0,290	3,910	0,000
R	0,434		
R square (R ²)	0,189		
F hitung	13,442		
Fsig	0,000		

Sumber : data diolah, 2015

Persamaan regresi yang dapat dihasilkan berdasarkan Tabel 6 yaitu:

$$Y = 3,274 + 0,198X_1 - 0,100X_2 - 2,178X_3 + 0,013X_4 + 0,290X_5 + e \dots \dots \dots (2) .$$

Nilai konstanta sebesar 3,274 berarti bahwa apabila variabel bebas yaitu kemakmuran pemerintah daerah (X_1), status daerah (X_2), tingkat ketergantungan pada pusat (X_3), belanja modal daerah (X_4), opini audit BPK (X_5) sama dengan nol, maka nilai kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar 3,274. $\beta_1=0,198$ berarti bahwa apabila kemakmuran pemerintah daerah meningkat, maka variabel kinerja pemerintah akan meningkat. $\beta_2=-0,100$ berarti bahwa apabila status daerah meningkat, maka variabel kinerja pemerintah daerah akan turun. $\beta_3=-2,178$; berarti bahwa apabila tingkat ketergantungan pada pusat meningkat, maka variabel kinerja akan turun. $\beta_4=0,013$ berarti bahwa apabila belanja modal daerah meningkat. $\beta_5=0,290$ berarti bahwa apabila opini audit BPK meningkat, maka variabel kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

Nilai *r square* (r^2) yaitu 0,189. hal ini berarti bahwa pengaruh variabel kemakmuran daerah, status daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal daerah, opini audit BPK pada kinerja pemerintah daerah sebesar 19% dan sisanya 81% variabel lain. Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemakmuran pemerintah daerah, status daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal daerah, dan opini audit berpengaruh terhadap variabel kinerja.

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan melakukan uji hipotesis. Nilai signifikansi variabel kemakmuran pemerintah daerah adalah 0,849 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar tentu memiliki

tekanan yang lebih besar, dari masyarakat untuk dapat mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya dalam perbaikan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan Marfiana (2013)

Nilai signifikansi variabel status daerah adalah 0,322 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel status daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Kedudukan Kabupaten dan Kota adalah sama/sejajar yaitu dibawah provinsi atau biasa disebut dengan daerah tingkat II Suhardjanto (2011). Persamaan di atas dimungkinkan menjadi faktor status daerah tidak mempengaruhi pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto (2011).

Nilai signifikansi variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah adalah 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh pada kinerja. nilai $t_3 = -2,178$ menunjukkan variabel ketergantungan berpengaruh negatif pada variabel kinerja pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak digunakan belanja yang bersifat rutin dibandingkan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2008)

Nilai signifikansi variabel belanja modal daerah adalah 0,956 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel belanja modal daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

kemungkinan pengeluaran Pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan Mustikarini (2012).

Nilai signifikansi variabel opini audit BPK adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel opini audit BPK berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. nilai $x_5=0,290$ menunjukkan variabel opini berpengaruh positif pada variabel kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak opini audit maka semakin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini TW (Opini Tidak Wajar) dan TMP (Opini Tidak Memberikan Pendapat). Hasil penelitian ini sejalan dengan Mustikarini (2012)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini yaitu kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Kemakmuran dengan aset dan kekayaan yang besar tentu memiliki tekanan yang lebih besar dari masyarakat, untuk dapat mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki Pemda dalam rangka perbaikan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Marfiana (2013). Status daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Status Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang sama untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Retnoningsih (2010) dan Suhardjanto (2011). Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana

Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemda bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga pemerintah daerah tidak berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena ketergantungannya terhadap pusat yang mengakibatkan kinerja pemerintah daerah menurun dan dana yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk belanja yang bersifat rutin. Hasil penelitian ini sejalan Rahim (2008). Belanja modal daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Pengeluaran Belanja Modal Daerah Pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan untuk belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran Pemda sehingga sering didapati ketidakcocokan antara program/kegiatan dengan *output/outcome* yang dihasilkan. Penelitian ini sejalan dengan Mustikarini (2012). Opini audit BPK RI berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak ditemukan opini WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) di suatu pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditemukan audit BPK maka kinerja Pemda semakin baik. Pendapat audit menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna menghasilkan kinerja yang baik pula Virgasari (2009) Indrarti (2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan Virgasari (2009) dan Indrarti (2011).

Saran yang dapat diberikan adalah untuk pemerintah daerah kabupaten/kota agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk membiayai belanja modal daerahnya sendiri sehingga akan mengurangi

transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemadirian daerah dalam membiayai belanjanya. Pemerintah daerah telah melakukan efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota itu sendiri yang dapat dilihat dari kemampuan belanja daerah. Penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variabel independen karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit yang lebih beragam, seperti menggunakan variabel perbedaan fungsional, usia, pembiayaan utang, dan latar belakang pendidikan bupati, serta menggunakan pengukuran temuan audit yang lebih luas misalnya jumlah kasus yang ditemukan dalam temuan audit atas SPI. Penelitian ini hanya menggunakan LKPD tahun 2013. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan LKPD Tahun berikutnya sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan hasil yang terbaru.

REFERENSI

- Abdullah, S. 2004. Perilaku *Oportunistik Legislatif* dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agency Theory*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester 1. Diakses melalui www.bpk.go.id. Diunduh tanggal 2, bulan mei, tahun 2015.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Bennet, R. 2010. Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's Big Bang, 1998-2010. Innovations for Successful Societies. *Jurnal Princeton University*, Pp: 1-11.
- Bernstein, J David. (2000). Local government measurement use to focus on performance and results. *Evaluation and Program Planning* 24 (2001) PP: 95-101. *Jurnal USA*.
- Carr, J. B. dan R. S. Brower. 2000. Principled opportunism: evidence from the organization middle. *Jurnal Public Administration Quarterly (Spring)*. Pp: 109-138.

- Florida, Asha. 2006 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara. Tesis Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan (<http://repository.usu.ac.id/handle123456789/4027>), diakses tanggal 15 Otober 2015.
- Ghozali, H. Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi Enam. Semarang: Universitas Diponogoro
- Green, Keith. 2005. Decentralization and Good Governance: The Case of Indonesia. Munich Personal RePEc Archive Paper, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de>. Diunduh tanggal 5, bulan mei, tahun 2015.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54, pp: 7.
- Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54, pp: 502-516.
- Heriningsih, Suchyo. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Buletin Ekonomi*, 11(1), pp:1-86
- Ikhtisar pemeriksaan semester I tahun 2013 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu (<http://www.bpk.go.id>). Diunggah Tanggal 5 Mei 2015.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal. Universitas Riau*.
- Julitawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1 (1), pp; 15-29.
- Kelly, Roy. 1999. *Intergovernmental Revenue Allocation Theory and Practice : an Application to Nepal*. *Asian Journal of Public Administration* Vol. 21 No. 1: 86-113. June 1999.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan didapatkan melalui website (<http://www.djpk.depkeu.go.id>). Diunggah tanggal 5 Mei 2015.

- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol.24, pp: 101-121.
- Lane, J.E. (2000). *New Public Management*. Routledge , London.
- Lee, J. 2008. Preparing Performance Information in The Public Sector: an Australian Perspective. *Journal Financial Accountability and Management*. 24 (2), pp: 117-149.
- Mandell, Lee M. 1997. Performance Measurements and management Tools in North Carolina Local Government. *Public Administration Quarterly*; Spring 1997: pp: 21-96.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: Simposium Nasional Akuntansi.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Nurdin, Fandy. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Mahasiswa FEB*.
- Pasal 5 Permendagri No.73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama.
- Patton, T. K., and D. R. Bean. 2001. The why and how of the new capital asset reporting requirements. *Public Budgeting and Finance*, Vol.21, pp: 31-46.
- Permendagri Nomor 74 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Penthury, M.A. 2011. Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3 (3), pp: 289-297.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 73 tahun 2009 pasal 17

Peraturan Perundangan No.6/2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 tahun 2009 tentang tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 73 tahun 2009 Pasal 32

Rusmin., Astami, Emita W. and Scully, Glennda. 2014. Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 8 (7), pp: 88-109.

Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.

Skor Kinerja Pemerintah Daerah 2013. www.otda.kemendagri.go.id. Diunggah Tanggal 5 Mei 2015

Sudarsana, Susila Hafidh. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (4), pp: 1-13.

Suhardjanto, Djoko dan Yuliningtyas, Rukmita Rena. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (1), pp: 1- 94.

Sumarjo, Hendro. 2010. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Suwanda, Dadang. 2015. Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of

the Republic of Indonesia (BPK). *Journal of Finance and Accounting*, 6 (4), pp: 139-157.

Syafitri, Febriyani. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

Undang-Undang No.33 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Daerah Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Utama, S. M. 2009. Aplikasi Analisis Kuantitatif (Edisi Ketiga). Denpasar: Sastra Utama.

Vago, 2008. Compliance-Does it Restrict Performance? Australasian Police Audit Conference. Auditor General Victoria.

Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.

Wahyudi Kumorotomo (2009). Isu Akuntabilitas Penganggaran Daerah. Indonesia.com

Yang, Kaifeng dan Hsieh, Jun Yi. 2007. Managerial Effectiveness of Government Performance Measurement: Testing a Middle-Range Model. *Public Administration Review* October 2007.